



DESAIN PENELITIAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PENDEKATAN, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGANNYA

Istiqomah¹, Salamah², Dina Hermina³

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri
Antarasi Banjarmasin ^{1,2,3}

Email: istiqomahsyamsi@gmail.com¹, salamah@uin-antasari.ac.id²,
dinahermina@uin-antasari.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze research design in educational policy, including its approaches, implementation, and challenges in the policy research process. The study employed a qualitative approach using a library research method by reviewing books, scientific journals, and relevant policy documents. Data were collected through documentation studies and analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that research design plays an important role in producing evidence-based educational policies that are relevant to educational needs. Three main approaches are commonly used in educational policy research, namely quantitative, qualitative, and mixed methods approaches, each of which has its own characteristics and advantages in analyzing educational policies. The implementation of research design has also been applied in various educational policy studies, such as the evaluation of School Operational Assistance (BOS), the Merdeka Curriculum, and inclusive education policies. In addition, the study found that the main challenges in educational policy research design include limited data access, stakeholder complexity, and gaps between theory and practice in the field. Therefore, a systematic and comprehensive research design is essential to support effective, adaptive, and quality-oriented educational decision-making.

Keywords : *research design, educational policy, evidence-based policy, policy evaluation, educational quality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain penelitian dalam kebijakan pendidikan, meliputi pendekatan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research) melalui pengkajian berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain penelitian kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri dalam menganalisis kebijakan pendidikan. Implementasi desain penelitian juga diterapkan dalam berbagai kajian kebijakan pendidikan, seperti evaluasi Dana BOS, Kurikulum Merdeka, dan pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian menemukan bahwa tantangan utama dalam desain penelitian kebijakan pendidikan meliputi keterbatasan data, kompleksitas pemangku kepentingan, serta kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Dengan demikian, desain penelitian yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci : *desain penelitian, kebijakan pendidikan, evidence-based policy, evaluasi kebijakan, mutu pendidikan*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia, kebijakan pendidikan terus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum, sistem evaluasi, hingga kebijakan zonasi dan Merdeka Belajar. Perubahan tersebut menuntut adanya penelitian kebijakan pendidikan yang sistematis dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Permasalahan utama dalam kebijakan pendidikan sering kali terletak pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi, lemahnya evaluasi kebijakan, serta kurangnya integrasi data dalam proses pengambilan keputusan. Banyak kebijakan dirancang tanpa melalui desain penelitian yang komprehensif, sehingga dampaknya kurang optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, desain penelitian kebijakan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata, didukung oleh data empiris, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam perspektif Islam, pentingnya perencanaan dan kebijakan yang matang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl/16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling

tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan berbasis pengetahuan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar selaras dengan tujuan nasional serta dinamika perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan terus mengalami pembaruan, baik dalam aspek kurikulum, tata kelola, maupun sistem evaluasi, guna meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan nasional. Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting untuk memahami proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan secara sistematis dan rasional.¹² Kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh aspek sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya, sehingga diperlukan pendekatan analitis yang komprehensif.³

Dalam perkembangannya, studi kebijakan pendidikan menuntut penggunaan desain penelitian yang tepat agar mampu menghasilkan temuan yang valid dan relevan bagi pengambilan keputusan. Pendekatan analisis kebijakan dapat dilakukan melalui model evaluatif, deskriptif, maupun komparatif, dengan mempertimbangkan prinsip *evidence-based policy*.⁴ Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan model analisis kebijakan menjadi landasan utama dalam merancang penelitian kebijakan pendidikan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

Secara ilmiah, penelitian evaluatif seperti yang dijelaskan oleh Patton (2015) melalui *Utilization-Focused Evaluation* menekankan bahwa hasil penelitian harus benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan.⁶ Selain itu, OECD (2018) dalam kajian internasionalnya menekankan pentingnya *evidence-based education policy* untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional.⁷

¹ Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). *Model Analisis Kebijakan Pendidikan*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah.

² Fathoni, W., Nasution, I. W., Yusup, M., Asiah, N. A., & Amirudin, A. (2025). *Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial

³ Rachmadani, F., & Ahmad, N. (2024). *Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities*. Foundasia, 16(1)

⁴ Febriano, R. D., & Yuadi, I. (2023). *Analisis Bibliometrik Kebijakan Berbasis Bukti dalam Bidang Pendidikan*. Cakrawala Journal, 17(2).

⁵ Widiastuti, I., & Cakranegara, P. A. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Attractive: Innovative Education Journal.

⁶ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications

⁷ OECD. (2018). *Education policy outlook 2018: Putting student learning at the centre*. OECD Publishing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis mengenai desain penelitian kebijakan pendidikan yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, desain penelitian, serta pendekatan analisis kebijakan. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta laporan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konsep utama, pendekatan penelitian, serta implementasi desain penelitian dalam kebijakan pendidikan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang relevan guna memperoleh hasil analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

KAJIAN TEORI

1. Definisi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan atau serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang jelas, seperti meningkatkan mutu pembelajaran, mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Secara sederhana, kebijakan ini bisa dipahami sebagai “pedoman bertindak” yang membantu mengatur segala hal di dunia pendidikan agar berjalan lebih terarah, adil, dan efektif mulai dari cara menyusun kurikulum, mengalokasikan dana sekolah, merekrut dan melatih guru, hingga mengevaluasi hasil belajar siswa.

Menurut Madjid (2018), kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang secara khusus mengatur penyerapan sumber daya, alokasi, distribusi sumber daya, serta pengaturan perilaku di bidang pendidikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama bangsa.⁸ Definisi ini sangat mudah dipahami karena menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar “kertas peraturan”, melainkan alat nyata pemerintah untuk memecahkan masalah pendidikan sehari-hari, seperti kesenjangan antar daerah, kualitas guru yang belum merata, atau kurangnya

⁸ Abd Majdid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

fasilitas di sekolah pedalaman.

Lebih lanjut Dye (2013), kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini mencakup regulasi, kurikulum, pembiayaan, dan sistem evaluasi.⁹ Tilaar & Nugroho (2016) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.¹⁰

2. Pengertian Desain Penelitian Kebijakan Pendidikan

Desain penelitian merupakan rencana atau strategi yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks kebijakan pendidikan, desain penelitian berperan penting untuk menganalisis masalah, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti. Pemilihan desain yang tepat memungkinkan peneliti menyesuaikan metode dan teknik pengumpulan data dengan karakteristik kebijakan serta tujuan penelitian, sehingga temuan yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan bagi pengambil keputusan.

Selain itu, desain penelitian juga membantu menjembatani teori dan praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran, peneliti dapat memahami proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap hasil belajar siswa.¹¹ Hal ini memastikan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹² Dalam kebijakan pendidikan, desain penelitian berfungsi untuk:

a. Menganalisis masalah kebijakan

Analisis masalah kebijakan merupakan langkah awal yang penting dalam setiap penelitian kebijakan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau tantangan yang muncul dalam perumusan maupun implementasi kebijakan. Dengan memahami akar masalah, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan konteks pendidikan, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Tahap ini mencakup pengumpulan informasi mengenai kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, kesiapan guru, dan faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Analisis masalah kebijakan juga membantu

⁹ Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.

¹⁰ Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan pendidikan*. Pustaka Pelajar.

¹¹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

¹² Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

menyoroti ketimpangan antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, menganalisis masalah kebijakan menjadi fondasi penting bagi langkah-langkah penelitian berikutnya, termasuk evaluasi dan rekomendasi.

b. Mengevaluasi efektivitas kebijakan

Evaluasi efektivitas kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengukuran hasil, baik dari sisi pencapaian kompetensi peserta didik maupun implementasi program di sekolah. Dengan mengevaluasi efektivitas, peneliti dapat mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai rencana, menemukan hambatan yang muncul selama pelaksanaan, dan menilai dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan serta memastikan kebijakan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pemangku kepentingan.

c. Memberikan rekomendasi berbasis bukti

Langkah selanjutnya dalam desain penelitian kebijakan adalah merumuskan rekomendasi berbasis bukti. Rekomendasi ini dihasilkan dari analisis data dan temuan penelitian yang sistematis, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambil keputusan dalam memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan. Rekomendasi berbasis bukti memastikan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian kebijakan tidak bersifat spekulatif, melainkan didukung oleh fakta dan hasil penelitian. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih responsif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan pembangunan pendidikan nasional. Menurut McMillan & Schumacher (2014), desain penelitian pendidikan dapat berupa pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun campuran (*mixed methods*).¹³

3. Teori dan Pendekatan Relevan

Beberapa pendekatan dalam desain penelitian kebijakan pendidikan meliputi:

a. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian kebijakan pendidikan digunakan untuk mengukur dampak kebijakan secara numerik dan objektif. Metode ini menekankan pengumpulan data berupa angka, statistik, atau indikator yang dapat diukur secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti menilai efektivitas kebijakan dengan presisi.

Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, mengevaluasi perbedaan antara kelompok yang terkena kebijakan dan kelompok kontrol, serta menilai

¹³ McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). *Research in education: Evidence-based inquiry* (7th ed.). Pearson.

pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap keberhasilan kebijakan. Pendekatan ini sangat berguna ketika penelitian memerlukan generalizabilitas temuan dan analisis yang dapat diulang, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar keputusan bagi pengambil kebijakan.

Pendekatan kuantitatif menekankan pengukuran numerik dan statistik untuk menilai dampak kebijakan secara obyektif, sehingga memungkinkan generalisasi temuan.¹⁴

b. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dalam penelitian kebijakan pendidikan digunakan untuk memahami proses, pengalaman, dan konteks implementasi kebijakan secara mendalam. Metode ini menekankan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen, sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, perspektif guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, serta hambatan dan tantangan yang muncul. Pendekatan ini berguna untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang interaksi antara teori kebijakan dan praktik di sekolah, sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan realistis.

Pendekatan kualitatif fokus pada pemahaman proses, konteks, dan pengalaman pemangku kepentingan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan.¹⁵

c. Mixed Methods

Pendekatan mixed methods menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan secara numerik sekaligus memahami konteks, pengalaman, dan dinamika implementasi di lapangan.

Kemampuannya untuk memadukan kekuatan kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan temuan penelitian tidak hanya bersifat obyektif dan terukur, tetapi juga relevan secara kontekstual. Pendekatan ini sangat berguna ketika penelitian kebijakan pendidikan membutuhkan pemahaman yang holistik, misalnya mengevaluasi dampak Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa sambil menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi di sekolah.¹⁶

¹⁴ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

¹⁵ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.

¹⁶ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

d. Policy Cycle Theory

Policy Cycle Theory menekankan bahwa setiap kebijakan melewati tahapan sistematis, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Pendekatan ini membantu peneliti memahami proses kebijakan secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhirnya, sehingga analisis dapat lebih terstruktur dan terfokus pada setiap fase kebijakan.

Dengan memahami tahapan kebijakan melalui Policy Cycle, peneliti dapat menilai bagaimana keputusan di tingkat perumusan berdampak pada implementasi di sekolah dan bagaimana evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan. Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian kebijakan pendidikan, karena memungkinkan identifikasi hambatan, faktor pendukung, dan perbedaan antara teori dan praktik, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Policy Cycle Theory menyediakan kerangka sistematis untuk menelaah tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, dalam membantu peneliti memahami hubungan antara teori dan praktik di lapangan.¹⁷

Secara keseluruhan, keempat pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi landasan yang kuat bagi penelitian kebijakan pendidikan yang efektif, akurat, dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan Kebijakan Pendidikan

Permasalahan kebijakan pendidikan seringkali berkaitan dengan ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Berbagai kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan pada kenyataannya masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan, baik dari aspek manajerial, kesiapan sumber daya manusia, maupun sistem pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan memerlukan analisis yang komprehensif agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.¹⁸ Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan kebijakan dan implementasi di tingkat satuan pendidikan menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan evaluasi berkelanjutan.¹⁹

Latar belakang munculnya kebijakan pendidikan umumnya didorong oleh kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, kebijakan dirumuskan sebagai respons terhadap tuntutan

¹⁷ Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.

¹⁸ Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati, R. A. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru*. MAPPESONA.

¹⁹ Fadlilah, D. R., Herlanti, Y., et al. (2023). *Sinkronisasi Peran SMK dan Kebijakan*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan.

perubahan sosial serta perkembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan.²⁰ Namun demikian, tanpa pendekatan metodologis yang tepat dalam menganalisis kebijakan, evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat deskriptif dan kurang mendalam. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan menjadi urgensi akademik untuk memastikan kebijakan dirancang dan dievaluasi secara sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.²¹

Implementasi Desain Penelitian Kebijakan Pendidikan

Dalam penelitian kebijakan pendidikan, teknik atau cara pengerjaannya (prosedur pelaksanaan) sangat bergantung pada pendekatan yang dipilih, karena setiap pendekatan memiliki langkah-langkah spesifik, alat pengumpulan data, dan teknik analisis yang berbeda agar hasilnya akurat, kredibel, dan berguna untuk perbaikan kebijakan. Secara umum, pengerjaan dimulai dari tahap persiapan (merumuskan masalah, tinjauan pustaka, dan desain penelitian), kemudian pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Pendekatan utama yang paling sering digunakan adalah kuantitatif, kualitatif, mixed methods (campuran), serta pendekatan khusus seperti studi kasus, analisis isi dokumen, atau evaluasi model seperti CIPP (Context-Input-Process-Product). Pilihan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian: jika ingin mengukur dampak kebijakan secara luas dan numerik (misalnya persentase peningkatan akses pendidikan setelah program BOS) maka bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, jika ingin memahami proses implementasi secara mendalam (misalnya hambatan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di daerah tertinggal), maka pendekatan yang digunakan bisa menerapkan kualitatif, dan jika butuh keduanya untuk hasil yang lebih lengkap, pakai mixed methods.²²

Untuk pendekatan kuantitatif, teknik pengerjaannya meliputi: (1) menentukan populasi dan sampel besar (misalnya survei nasional terhadap ribuan guru atau siswa), (2) menyusun instrumen seperti kuesioner atau tes standar, (3) mengumpulkan data melalui survei online/offline atau data sekunder dari Kemendikbudristek, (4) mengolah data dengan software seperti SPSS atau Excel (analisis deskriptif, regresi, uji statistik), dan (5) menarik kesimpulan generalisasi. Pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan “seberapa besar dampak kebijakan?” dan sering digunakan dalam evaluasi program nasional karena hasilnya mudah diukur dan dibandingkan antar daerah.

Sedangkan pendekatan kualitatif pengerjaannya lebih fleksibel dan mendalam:

²⁰ Rizal Sainuddin, M., Semi, H., Yuspiani, et al. (2024). *Education Policy Analysis of Management Information Systems*. Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan.

²¹ Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif Metodologi*. Jurnal Visionary.

²² Wildan Fathoni et al., “Teori Dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 488–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15861773>.

(1) memilih sampel purposive atau snowball (misalnya wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua yang terdampak langsung), (2) teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan di sekolah, fokus group discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan (UU, Permendikbud, laporan implementasi), (3) analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi (menggunakan software seperti NVivo jika memungkinkan), serta (4) memastikan keabsahan melalui triangulasi (bandingkan data dari berbagai sumber) dan member check. Pendekatan ini unggul dalam mengungkap konteks sosial-budaya, persepsi stakeholder, dan alasan kegagalan implementasi, yang sering tidak terlihat dari angka semata.

Pendekatan mixed methods menggabungkan keduanya secara terintegrasi, dengan urutan yang umum adalah eksplanatori sekuensial (kuantitatif dulu, lalu kualitatif untuk menjelaskan hasil angka) atau eksploratori sekuensial (kualitatif dulu untuk menemukan pola, lalu kuantitatif untuk menguji). Teknik pengerjaannya: mulai dari pengumpulan data kuantitatif (survei), analisis statistik, lalu lanjut ke data kualitatif (wawancara) untuk menjelaskan “mengapa” hasil survei seperti itu, kemudian integrasi hasil di tahap akhir. Pendekatan ini semakin populer di Indonesia karena kebijakan pendidikan kompleks dan butuh bukti yang kuat sekaligus pemahaman kontekstual.²³

Selain itu, teknik lain yang relevan yaitu studi kasus yaitu fokus pada satu atau beberapa sekolah/daerah sebagai kasus mendalam dengan triangulasi data, analisis isi (menganalisis dokumen kebijakan seperti Permendikbud atau laporan evaluasi), dan evaluasi kebijakan menggunakan model seperti policy cycle (tahap agenda setting hingga evaluasi) atau CIPP untuk menilai konteks, input, proses, dan produk kebijakan. Secara keseluruhan, pengerjaan penelitian kebijakan pendidikan harus etis (izin penelitian, kerahasiaan responden), partisipatif (melibatkan stakeholder), dan berorientasi solusi agar rekomendasinya bisa langsung diterapkan oleh pemerintah atau sekolah. Dengan teknik yang tepat sesuai pendekatan, penelitian tidak hanya akademis tapi juga berkontribusi nyata pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Contoh Penelitian Kebijakan Pendidikan

a. Model Kuantitatif:

Salah satu contoh implementasi kuantitatif yang kuat adalah penelitian Romlah et al. (2023) yang berjudul Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis (BOS dan Subsidi Pendidikan) terhadap Pemerataan Akses dan Kualitas Belajar di Indonesia.²⁴

²³ H.S.S Pettalongi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*, 1st ed. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025).

²⁴ Siti Romlah et al., “A Free Education Policy in Indonesia for Equitable Access and Improvement of the Quality of Learning,” *Cogent Education* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>.

Karya ilmiah ini meneliti efek kebijakan pendidikan gratis (melalui dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS dan subsidi pendidikan) terhadap pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan kualitas belajar di sekolah dasar dan menengah pertama negeri di Kota Probolinggo, Indonesia. Penelitian ini murni kuantitatif dengan desain *ex-post facto* (menganalisis kejadian yang sudah terjadi) dan jenis survei, sehingga cocok untuk mengukur “seberapa besar” pengaruh kebijakan terhadap indikator kebijakan pendidikan nasional. Cara Pelaksanaan Penelitian melalui tahapan sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel: Populasi adalah seluruh guru dan kepala sekolah di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Probolinggo. Sampel diambil secara purposive atau cluster sampling untuk mewakili sekolah-sekolah yang menerima dana BOS secara penuh, menghasilkan sampel yang representatif dari implementasi kebijakan nasional.
2. Instrumen Pengumpulan Data: Menggunakan kuesioner terstruktur (skala Likert) untuk mengukur variabel:
 - a. Implementasi kebijakan pendidikan gratis (exogenous variable): mencakup alokasi dana, transparansi penggunaan, dan dukungan pemerintah.
 - b. Pemerataan akses layanan pendidikan (endogenous): seperti tingkat partisipasi siswa, penurunan angka putus sekolah, dan akses bagi siswa miskin.
 - c. Peningkatan kualitas belajar (endogenous): seperti peningkatan nilai siswa, kompetensi guru, dan fasilitas belajar.

Kuesioner divalidasi dengan uji validitas dan reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0.7).

3. Pengumpulan Data: Disebarkan secara langsung atau online kepada responden (guru dan kepala sekolah) pada periode pasca-implementasi kebijakan BOS terbaru
4. Analisis Data: Menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan software seperti AMOS atau SmartPLS untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel.
5. Analisis meliputi: Uji deskriptif (mean, persentase), Uji hipotesis path analysis, Pengukuran goodness-of-fit model (misalnya CFI, RMSEA, GFI). Hasil statistik menunjukkan pengaruh signifikan (p -value < 0.05).
6. Hasil Utama:
 - a. Implementasi kebijakan pendidikan gratis berpengaruh langsung dan signifikan sebesar 68.5% terhadap pemerataan akses pendidikan (artinya dana BOS sangat membantu mengurangi kesenjangan akses, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu).
 - b. Pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas belajar sebesar 29.6%, dan pengaruh tidak langsung melalui pemerataan akses sebesar 49.8%.

- c. Pemerataan akses berpengaruh sangat kuat (72.7%) terhadap kualitas belajar, menunjukkan bahwa akses yang merata adalah kunci utama peningkatan mutu.
- d. Secara keseluruhan, kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan konstitusional pendidikan (Pasal 31 UUD 1945), tapi masih ada tantangan seperti ketidakmerataan distribusi dana antar daerah.

7. Rekomendasi Kebijakan:

Pendekatan Kuantitatif berguna terhadap kebijakan pendidikan karena, Pendekatan seperti ini memberikan bukti empiris berbasis angka yang kuat dan dapat digeneralisasi ke tingkat nasional. Hasilnya bisa menjadi dasar bagi Kemendikbudristek untuk merevisi alokasi BOS (misalnya prioritas daerah tertinggal), meningkatkan monitoring transparansi dana, dan memperkuat evaluasi dampak kebijakan secara periodik. Model SEM memungkinkan pemahaman hubungan kausal yang kompleks, sehingga rekomendasi lebih presisi dan *evidence-based* bukan sekadar opini.

b. Model Kualitatif:

Penelitian yang dilakukan Nabila & Adiputra (2025) dalam menganalisis kebijakan pendidikan Indonesia melalui upaya pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.²⁵

Penelitian ini murni kualitatif karena ingin memahami “bagaimana” proses implementasi berjalan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dinamika di lapangan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi), bukan sekadar mengukur angka atau statistik. Fokusnya pada evaluasi implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, sehingga pendekatan ini sangat cocok untuk mengungkap tantangan nyata seperti adaptasi guru, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga yang sering tidak terlihat dari data kuantitatif. Cara Pelaksanaan Penelitian melalui tahapan sebagai berikut:

1. Desain Penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis teori implementasi Edward III. Penelitian ini bersifat evaluatif untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Kota Tanjungpinang sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional.
2. Partisipan/Sampel: Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, yaitu Kepala Bidang Pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (sebagai pelaku utama implementasi di tingkat pemerintah daerah). Sampel purposive untuk mendapatkan perspektif langsung dari aktor kebijakan.
3. Teknik Pengumpulan Data: Kombinasi observasi (pengamatan langsung

²⁵ Putri Nabila et al., “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang),” *APPISI* 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i3.417>.

proses koordinasi dan sosialisasi), wawancara semi-terstruktur (untuk mendalami komunikasi, sumber daya, sikap guru, dan struktur birokrasi), serta analisis dokumen (seperti Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, laporan rapat koordinasi, dan panduan turunan kurikulum). Data dikumpul secara bertahap untuk memastikan kedalaman pemahaman.

4. Analisis Data: Analisis kualitatif melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (model Miles & Huberman). Data dianalisis berdasarkan empat variabel Edward III: komunikasi (efektivitas sosialisasi), sumber daya (fasilitas dan pelatihan), disposisi (sikap guru dan stakeholder), serta struktur birokrasi (koordinasi dan SOP). Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, observasi) dan konfirmasi dengan informan.
5. Hasil Utama:
 - a. Komunikasi kebijakan berjalan baik melalui rapat koordinasi dan sosialisasi, meskipun konsistensi internal di Dinas Pendidikan perlu ditingkatkan.
 - b. Sumber daya mendukung melalui bimbingan teknis guru dan turunan kurikulum sesuai Permendikbudristek No. 12/2024, tapi masih ada kendala adaptasi guru, ketersediaan materi ajar, serta sarana prasarana yang terbatas.
 - c. Sikap guru terhadap Kurikulum Merdeka umumnya positif, dipengaruhi oleh pemahaman mereka, dukungan sumber daya, dan lingkungan kerja.
 - d. Struktur birokrasi yang jelas dan SOP yang terdefinisi baik mendukung implementasi secara keseluruhan.
 - e. Secara umum, implementasi menunjukkan progres positif, tapi masih ada hambatan yang memerlukan penyesuaian.
6. Rekomendasi Kebijakan:
 - a. Meningkatkan komunikasi internal yang lebih konsisten di Dinas Pendidikan.
 - b. Menyediakan sumber daya lebih memadai seperti materi ajar lengkap, sarana prasarana, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru.
 - c. Melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk penyesuaian kebijakan.
 - d. Penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang Kurikulum Merdeka terhadap prestasi siswa dan pengembangan karakter.

Penelitian kualitatif seperti ini berguna karena sangat mudah dipahami dan kuat dalam menggali proses implementasi kebijakan dari perspektif aktor lokal (Dinas Pendidikan dan sekolah), yang sering menjadi titik lemah dalam kebijakan top-down nasional. Hasilnya memberikan wawasan mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat di tingkat daerah, sehingga rekomendasi lebih

kontekstual, realistis, dan bisa langsung diterapkan oleh pemerintah kota atau provinsi. Temuan ini bisa menjadi dasar bagi Kemendikbudristek untuk memperkuat dukungan regional, meningkatkan pelatihan guru, dan memastikan kebijakan Kurikulum Merdeka lebih adaptif terhadap kondisi lokal di seluruh Indonesia.

c. Model Mixed Method:

Penelitian yang dilakukan Fauziyah et al. (2025) dalam mengevaluasi inisiatif kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan fokus pada implementasi dari kebijakan hingga praktik di lapangan (studi di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur).²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (campuran) karena menggabungkan data kuantitatif untuk mengukur tingkat pencapaian dan kualitatif untuk menjelaskan alasan di balik angka-angka tersebut, sehingga hasilnya lebih komprehensif, holistik, dan langsung berguna untuk rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan kompleks seperti “Seberapa efektif kebijakan inklusi?” sekaligus “Mengapa ada disparitas antar daerah?”. Berikut adalah tahapan dalam Pelaksanaan Penelitian.

1. Desain Penelitian: Mixed methods dengan desain sequential explanatory (kuantitatif dulu untuk mengidentifikasi pola umum, kemudian kualitatif untuk menjelaskan pola tersebut). Fase kuantitatif mendominasi pengumpulan data awal, diikuti fase kualitatif untuk mendalami temuan.
2. Partisipan/Sampel:
 - a. Kuantitatif: 150 guru, 50 pejabat pemerintah daerah (Dinas Pendidikan), dan 30 anggota masyarakat/komite sekolah di empat lokasi (Surabaya dan Makassar sebagai urban; Pamekasan dan Maros sebagai rural).
 - b. Kualitatif: 20-25 informan kunci dari sampel kuantitatif (dipilih purposive berdasarkan hasil survei yang menonjol, seperti guru dengan skor pelatihan rendah atau tinggi).
3. Teknik Pengumpulan Data:
 - a. Fase Kuantitatif: Survei terstruktur menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur variabel seperti tingkat pelatihan guru inklusi, ketersediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD), dukungan fasilitas, dan kepuasan implementasi kebijakan. Instrumen divalidasi (uji reliabilitas Cronbach's Alpha > 0.8) dan disebarluaskan secara online/offline.
 - b. Fase Kualitatif: Wawancara mendalam semi-terstruktur (durasi 45–60 menit) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok kecil (guru, pejabat, orang tua siswa berkebutuhan khusus). Observasi tambahan di sekolah untuk melihat praktik inklusi sehari-hari

²⁶ Nur Fauziyah et al., “Evaluating Inclusive Education Initiatives in Indonesia : From Policy to Practice,” *Educational Process: International Journal* 16 (2025), <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.16.232>.

4. Analisis Data:
 - a. Kuantitatif: Statistik deskriptif (persentase, mean, standar deviasi) dan inferensial (uji t atau ANOVA untuk membandingkan urban vs rural). Hasil diolah dengan SPSS atau Excel.
 - b. Kualitatif: Thematic analysis (mengikuti Braun & Clarke: familiarisasi data, coding, pencarian tema, review, definisi tema, dan narasi akhir).
 - c. Integrasi: Joint display (tabel gabungan) untuk menghubungkan hasil kuantitatif dengan penjelasan kualitatif, misalnya persentase pelatihan rendah di rural dijelaskan oleh hambatan dana dan akses geografis dari wawancara.
 - d. Validasi: Triangulasi metode (data dari survei, wawancara, FGD), member checking, dan peer review.
5. Hasil Utama:
 - a. Kuantitatif: Di daerah urban (Surabaya 75%, Makassar 72%) mayoritas guru telah menerima pelatihan inklusi yang memadai melalui ULD dan program reguler. Di daerah rural (Pamekasan 55%, Maros 48%) pelatihan jauh lebih rendah karena keterbatasan dana, logistik, dan jarak.
 - b. Kualitatif: Hambatan utama di rural termasuk kurangnya fasilitas ramah disabilitas, minimnya guru pendamping khusus, resistensi budaya lokal terhadap inklusi, dan koordinasi lemah antarinstansi. Di urban, dukungan lebih baik karena akses ke pelatihan dan kolaborasi dengan LSM.
 - c. Integrasi: Kebijakan inklusif efektif di kota besar tapi gagal merata di daerah pedesaan karena ketidakmerataan sumber daya dan implementasi.
6. Rekomendasi Kebijakan:
 - a. Strategi diferensiasi regional: alokasi dana lebih besar untuk daerah rural, pembangunan ULD mobile, dan pelatihan berbasis daring/hybrid.
 - b. Kerjasama lintas sektor (pemerintah daerah, sekolah, LSM, komunitas) untuk meningkatkan inklusi.
 - c. Monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator campuran (kuantitatif+kualitatif) agar kebijakan dapat disesuaikan secara berkelanjutan.

Pendekatan Mixed methods ini berguna terhadap kebijakan pendidikan karena pendekatan seperti ini sangat mudah dipahami dan kuat dengan memberikan bukti angka yang meyakinkan (untuk alokasi anggaran dan target nasional) sekaligus penjelasan mendalam (untuk perbaikan implementasi di lapangan). Hasilnya lebih kredibel bagi pembuat kebijakan seperti Kemendikbudristek dan pemerintah daerah, karena tidak hanya menunjukkan “seberapa besar” masalahnya, tapi juga “mengapa” dan “bagaimana” memperbaikinya. Temuan ini bisa menjadi dasar revisi kebijakan inklusi pendidikan, terutama untuk mencapai target SDGs 4 (pendidikan inklusif dan berkualitas) di Indonesia yang beragam secara geografis

dan sosial.

Tantangan dalam Desain Penelitian Kebijakan Pendidikan

Merancang desain penelitian kebijakan pendidikan bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses dan keterbatasan data, baik data sekunder berupa dokumen kebijakan maupun data primer dari satuan pendidikan. Beberapa dokumen mungkin tidak lengkap, kurang terstruktur, atau sulit diakses, sehingga peneliti perlu melakukan strategi triangulasi untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Tantangan berikutnya adalah kompleksitas pemangku kepentingan. Kebijakan pendidikan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga peserta didik. Perbedaan kepentingan dan persepsi di antara para pemangku kepentingan ini dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan dan mempersulit peneliti untuk mendapatkan gambaran yang objektif.²⁸

Selain itu, tantangan metodologis juga sering muncul. Peneliti harus memilih pendekatan dan teknik analisis yang sesuai dengan karakter kebijakan, tujuan penelitian, dan sumber data yang tersedia. Misalnya, penelitian kualitatif memerlukan wawancara mendalam dan observasi yang intensif, sedangkan penelitian evaluatif membutuhkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.²⁹ Tantangan lain termasuk menjaga konsistensi antara teori dan praktik, serta memastikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan relevan dan aplikatif.³⁰

Kurangnya data yang valid dan reliable juga termasuk dalam tantangan dalam desain kebijakan pendidikan. Banyak dokumen kebijakan, laporan evaluasi, dan arsip resmi yang belum tersusun dengan baik atau sulit diakses, sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat.³¹ Kondisi ini menuntut strategi pengumpulan data yang sistematis, termasuk studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³²

Demikian juga dengan terbatasnya evaluasi kebijakan yang dilakukan. Tidak semua kebijakan diimplementasikan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi

²⁷ Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati, R. A. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru*. MAPPESONA.

²⁸ Fadlilah, D. R., Herlanti, Y., et al. (2023). *Sinkronisasi Peran SMK dan Kebijakan*. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.

²⁹ Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif Metodologi*. *Jurnal Visionary*.

³⁰ Purwanti, E., Setiawan, F., Pertiwi, A. R., & Purwaningsih, P. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

³¹ Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati, R. A. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru*. MAPPESONA.

³² Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif Metodologi*. *Jurnal Visionary*.

yang konsisten, sehingga sulit menilai efektivitas dan dampak kebijakan di lapangan.³³ Hal ini menjadi kendala bagi peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan, serta untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti yang konkret.³⁴

Tidak bisa di pungkiri bahwa kesenjangan antara teori dan praktik sering kali terjadi. Walaupun kebijakan dirumuskan berdasarkan kerangka teori yang kuat, implementasinya di satuan pendidikan sering berbeda dengan perencanaan karena keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, dan kondisi lokal sekolah.³⁵ Peneliti harus mampu menjembatani perbedaan ini agar hasil analisis mencerminkan kondisi nyata dan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan yang efektif.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, peneliti dapat merancang desain penelitian yang lebih matang, memilih strategi pengumpulan dan analisis data yang tepat, serta menyiapkan mitigasi terhadap hambatan yang mungkin muncul selama penelitian. Hal ini akan meningkatkan validitas temuan serta memastikan hasil penelitian memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pendidikan.

Implementasi Desain Penelitian Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan Islam

Implementasi desain penelitian kebijakan pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam berfokus pada analisis sistematis terhadap kebijakan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam, baik di tingkat madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam terpadu. Desain penelitian kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mutu pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.³⁶ Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, hal ini dapat diterapkan pada berbagai aspek, mulai dari kurikulum berbasis nilai Islam, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, hingga pengembangan sarana-prasarana dan tata kelola lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pendidikan Islam.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai implementasi kebijakan pendidikan dari perspektif manajemen. Misalnya, kebijakan peningkatan kompetensi guru di madrasah dapat dievaluasi melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja lembaga, dan hasil pendidikan yang terdokumentasi. Penelitian kebijakan juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi stakeholder, termasuk kepala madrasah, guru, komite sekolah, orang tua, dan lembaga akreditasi, sehingga setiap keputusan manajerial dapat

³³ Fadlilah, D. R., Herlanti, Y., et al. (2023). *Sinkronisasi Peran SMK dan Kebijakan*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan.

³⁴ Purwanti, E., Setiawan, F., Pertiwi, A. R., & Purwaningsih, P. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Inovasi Penelitian.

³⁵ Danhas, Y. (2021). *Analisis Pengelolaan dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*. Deepublish.

³⁶ Berman, P. (1978). *The Study of Educational Policy*. London: Croom Helm.

dipertanggungjawabkan.³⁷ Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis *evidence-based policy*, yang menjamin kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik nyata di lembaga.

Implementasi desain penelitian kebijakan pendidikan dalam manajemen pendidikan Islam membantu lembaga untuk merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merancang program peningkatan mutu, misalnya perbaikan kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi tata kelola keuangan yang transparan, dan pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Pendekatan ini juga mendukung pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat, sehingga manajemen pendidikan Islam tidak hanya mengikuti regulasi formal, tetapi juga adaptif terhadap konteks lokal dan nilai-nilai Islam.³⁸

Integrasi desain penelitian kebijakan pendidikan ke dalam manajemen pendidikan Islam menghasilkan siklus manajerial yang berbasis bukti: perencanaan kebijakan → implementasi di lembaga → evaluasi melalui penelitian → perbaikan kebijakan berikutnya. Siklus ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga Islam di mata publik dan stakeholder, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan manajerial sesuai dengan prinsip pendidikan Islam yang holistik dan berkelanjutan.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan penelitian kebijakan pendidikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Desain penelitian kebijakan pendidikan merupakan rencana atau strategi sistematis yang disusun untuk menganalisis masalah, mengevaluasi efektivitas, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Desain ini berfungsi sebagai jembatan antara teori akademik dengan praktik di lapangan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil bersifat rasional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
2. Terdapat tiga pendekatan utama dalam desain penelitian kebijakan pendidikan yang masing-masing memiliki peran strategis, yaitu:
 - a. Pendekatan Kuantitatif: Digunakan untuk mengukur dampak kebijakan secara numerik, objektif, dan dapat digeneralisasi.
 - b. Pendekatan Kualitatif: Digunakan untuk memahami proses,

³⁷ Levin, B. (2001). *Policy Analysis in Education: A Guide for Practitioners*. Toronto: University of Toronto Press.

³⁸ Sallis, E. (2010). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge

³⁹ Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.

- pengalaman aktor di lapangan, dan konteks sosial-budaya implementasi kebijakan secara mendalam.
- c. Pendekatan Mixed Methods: Mengintegrasikan kekuatan data angka dan narasi untuk memberikan gambaran kebijakan yang komprehensif dan holistik.
 3. Implementasi desain penelitian dalam kebijakan pendidikan di Indonesia telah diterapkan pada berbagai isu krusial, seperti evaluasi Dana BOS (kuantitatif), implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat daerah (kualitatif), serta evaluasi pendidikan inklusif (mixed methods). Secara teologis dan ilmiah, desain penelitian yang matang mencerminkan prinsip "Hikmah" (QS. An-Nahl: 125), di mana kebijakan dirumuskan melalui pengetahuan yang benar dan metode yang bijaksana untuk memecahkan masalah seperti kesenjangan akses dan mutu pendidikan.
 4. implementasi desain penelitian kebijakan pendidikan dalam manajemen pendidikan Islam memungkinkan lembaga untuk mengelola pendidikan secara berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi sistematis terhadap kebijakan, praktik manajerial di madrasah, pesantren, atau sekolah Islam terpadu dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, standar mutu pendidikan, dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi stakeholder, sehingga setiap keputusan manajerial tidak hanya formalitas administratif, tetapi berdasar pada data dan analisis yang relevan. Dengan demikian, integrasi penelitian kebijakan ke dalam manajemen pendidikan Islam mendorong pengambilan keputusan yang efektif, adaptif, dan holistik, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan sah secara moral maupun profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. & Ananda, E. R. (2023). *Model-model pengembangan kebijakan pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Sains (JUPISI), 3(1), 21-27.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati, R. A. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait peningkatan kinerja guru. *MAPPESONA*.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiayanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Berman, P. (1978). *The Study of Educational Policy*. London: Croom Helm.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Danhas, Y. (2021). *Analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan/pembelajaran*. Deepublish.

- Dewi, R. K. & Karsidi, R. (2025). *Analysis of Teachers' Perceptions of Digital Education Policy in Civics Education*. e-Journal Metrouniv.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* – buku klasik analisis kebijakan.
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O. & Wijaya, H. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(7), 7094-7100.
- Dwiastuti, I. W. (2025). *Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievements, and Future Direction*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 17(2), 1955-1964.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Education Finance and Policy* – jurnal timur pendidikan publik & kebijakan (MIT Press).
- Education Policy Implementation and Challenges* (2025). Civiliza Journal of Educational Research.
- Education Policy Implementation in/at School Level* (2024). International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
- Education Policy in Indonesia Versus Japan* (2025). ESJ Education and South Institute.
- Educational Policy Analysis: Literature Review* (2023). AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
- Evaluating Merdeka Curriculum Policy in Indonesia* (2025). Jurnal Pendidikan Pasundan.
- Fadlilah, D. R., Herlanti, Y., et al. (2023). Sinkronisasi peran SMK dan kebijakan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.
- Fathoni, Wildan, Imam Wahyudi Nasution, Muhammad Yusup, and Nur Asiah. "Teori Dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 488-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15861773>.
- Fatimah, A. F., Swadaya, A. A. & Ellingsen, A. T. (2024). *Literature Curriculum Development through Education Policy: A Literature Study Analysis*. Journal of Law and Regulation Governance.
- Fauziyah, Nur, Nirwanto Maruf, Dodi Jaya Wardana, Fatimah Azis, Erni Ekafitria Bahar, and Andi Husniati. "Evaluating Inclusive Education Initiatives in Indonesia : From Policy to Practice." *Educational Process: International Journal* 16 (2025). <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.16.232>.
- Febriano, R. D. & Yuadi, I. (2023). *Analisis Bibliometrik Kebijakan Berbasis Bukti dalam Bidang Pendidikan*. Cakrawala Journal, 17(2).
- Ghimire, A. & Edwards, J. (2024). *From Guidelines to Governance: A Study of AI Policies in Education*. arXiv preprint.
- He, S. (2024). *Quantifying Educational Competition: A Game-Theoretic Model with Policy Implications*. arXiv preprint.

- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Jamaluddin, F. et al. (2025). *Malaysia's AI-Driven Education Landscape: Policies, Applications, and Comparative Insights*. arXiv preprint.
- Journal of Education Policy* – jurnal internasional utama pendidikan kebijakan (Taylor & Francis).
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*.
- Kraft, M. E. & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*.
- Legal Review of Inclusive Education Policy* (2025). Najaha Journal.
- Levin, B. (2001). *Policy Analysis in Education: A Guide for Practitioners*. Toronto: University of Toronto Press.
- Majdid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. 1st ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). *Research in education: Evidence-based inquiry* (7th ed.). Pearson.
- Nabila, Putri, Yudhanto Satyagraha Adiputra, Universitas Maritim, and Raja Ali. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang)." *APPISI 2* (2025).
- Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2019). Metode penelitian kebijakan pendidikan alternatif metodologi. *Jurnal Visionary*.
- Nasrullah (2025). *Comparative Study of Educational Policy Implementation in Indonesia and Malaysia*. Indonesian Journal of Education and Science, 1(4), 165-176.
- OECD (2025). *Everybody Cares About Using Education Research* report – evidence use in education policy.
- OECD. (2018). *Education policy outlook 2018: Putting student learning at the centre*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pettalongi, H.S.S. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. 1st ed. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Policy Analysis and Its Implications in Indonesia* (2025). ICHeS Proceedings.
- Rachmadani, F. & Ahmad, N. (2024). *Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities*. Foundasia, 16(1). *Review of Research in Education* – overview riset pendidikan global.
- Rizal Sainuddin, M., Semi, H., Yuspiani, et al. (2024). Education policy analysis of management information systems. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Roe, J. & Perkins, M. (2024). *Generative AI and Agency in Education: A Critical Scoping Review*. arXiv preprint.
- Romlah, Siti, Ali Imron, Asep Sunandar, and Zummy Anselmus Dami. "A Free

- Education Policy in Indonesia for Equitable Access and Improvement of the Quality of Learning." *Cogent Education* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>.
- Rosidin, A. et al. (2025). *Exploring Educational Policy Innovations and Curriculum Development in Indonesian Higher Education: A Systematic Review*. *Journal of Education Culture and Society*, 16(2).
- Sabatier, P. A. & Weible, C. M. (2014). *Theories of the Policy Process*.
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge
- Stone, D. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Widiastuti, I., & Cakranegara, P. A. (2021). Evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*
- Wahyuningsih, S., Lathiefah, U. & Jalaludin (2025). *Educational Policy Analysis in the Perspective of Theory, Model, and Implementation in Indonesia*. *Civic Engagement and Social Education Journal*.